

JURNAL DINAMIKA AKUNTANSI DAN BISNIS

Vol. 1, No. 1, Maret 2014

Hal. 12-29

Kajian Pengaruh Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), Pertumbuhan Ekonomi dan Alokasi Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Sumatera Utara

ISKANDAR MUDA

Fakultas Ekonomi USU

SYAFRIZAL HELMI

Fakultas Ekonomi USU

AZIZUL KHOLIS

Fakultas Ekonomi Unimed

Abstract

The purpose of this study was to see whether there is influence of Construction Cost Index, Economic Growth and Capital Expenditure Allocation simultaneously and partially on the Human Development Index (HDI) in the District/Town of North Sumatera. This study used a sample of 25 (twenty five) than 33 (thirty three) District/Town of North Sumatera during a period of 6 years from 2005 to 2011. Variable Construction Cost Index, Economic Growth and Capital Expenditure Allocation using the data of 2005-2010, while for the variable Human Development Index (HDI) using data for 2006 to 2011. By using multiple regression analysis and testing classical assumption of normality, multicollinearity, heteroscedasticity and autocorrelation. The results showed simultaneous variable Construction Cost Index, Economic Growth and Capital Expenditure significant effect on the Human Development Index (HDI) in the District/Town of North Sumatra. The results of this study reinforce research Sihombing (2009) and Kharismawan (2009). In partial Construction Cost Index and Economic Growth significant effect on the Human Development Index (HDI) in the District/Town of North Sumatera. While variable Capex / Development no significant effect on the Human Development Index (HDI) in the District/Town of North Sumatera.

Keywords: *Human Development Index (HDI), Construction Cost Index, Economic Growth and Capital Expenditure Allocation.*

1. Pendahuluan

Human Development Index (HDI) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan Indeks yang direfleksikan dari indikator angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan kemampuan daya beli. Dua faktor penting yang dinilai efektif dalam pembangunan manusia adalah pendidikan dan kesehatan. Kedua faktor ini cerminan sebagai manusia yang mengenyam pendidikan dan memiliki jiwa yang sehat. Dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 disebutkan bahwa Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) merupakan salah

satu variabel yang digunakan dalam penghitungan dana perimbangan Dana Alokasi Umum (DAU). Dalam formulasi penghitungan DAU, IKK digunakan sebagai proksi untuk menggambarkan tingkat kesulitan geografis suatu daerah, dengan demikian, semakin sulit letak geografis daerah tersebut maka semakin tinggi pula angka IKK-nya. Dengan adanya DAU diharapkan daerah yang mempunyai IPM rendah mampu untuk mengejar ketertinggalannya dari daerah lain yang mempunyai IPM lebih baik karena memperoleh alokasi dana yang berlebih. Namun hal ini tergantung pada kebijakan dan strategi pembangunan dari masing-masing daerah apakah mampu memanfaatkan kucuran dana yang ada untuk mencapai hasil pembangunan khususnya pembangunan manusia secara lebih baik.

Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan atau kinerja (*performance*) suatu negara atau wilayah dalam bidang pembangunan manusia, digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). Hubungan pembangunan manusia dengan pertumbuhan ekonomi sangat erat sekali dan merupakan prasyarat tercapainya pembangunan manusia, karena peningkatan pembangunan ekonomi akan mendukung peningkatan produktivitas melalui pengisian kesempatan kerja dengan usaha-usaha produktif sehingga tercipta peningkatan pendapatan (UNDP, 1996). Namun perlu dicatat bahwa konsep pembangunan manusia berbeda dengan pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi, dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan menguntungkan manusia.

Pembangunan manusia memperkenalkan konsep yang lebih luas dan lebih konferensif yang mencakup semua pilihan yang dimiliki oleh manusia pada semua golongan masyarakat dan semua tahap pembangunan. Pembangunan manusia merupakan perwujudan tujuan jangka panjang dari suatu masyarakat dan meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, bukan manusia di sekeliling pembangunan. Provinsi Sumatera Utara saat ini secara nasional menduduki urutan ke 8 (delapan) untuk Indeks Pembangunan Manusia. Kota Pematang Siantar merupakan daerah yang memiliki IPM tertinggi dalam beberapa kurun waktu saat ini. Untuk mengatasi permasalahan yang menghambat pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat.

Beberapa riset sebelumnya yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia kebanyakan melakukan riset faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia berasal dari aspek dana Perimbangan seperti Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus ataupun dari aspek Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian Lugastoro (2013) meneliti Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/Kota di Jawa Timur. Hasil menunjukkan rasio PAD dan DAK terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap IPM sedangkan variabel DAU berpengaruh negatif signifikan. Sementara itu rasio DBH terhadap belanja modal menjadi satu-satunya variabel yang tidak signifikan mempengaruhi IPM. Pertumbuhan ekonomi menjadi variabel dengan pengaruh paling dominan terhadap IPM. Peneliti termotivasi melakukan penelitian berdasarkan dengan memasukkan variabel aspek Kemahalan Konstruksi (IKK) untuk melengkapi riset sebelumnya. Selain itu riset ini lebih tepat dilakukan apabila mengidentifikasi dari aspek Belanja Modal dimana belanja modal merupakan hal yang bersentuhan langsung kemasyarakat. Penggunaan variabel Belanja Tidak Langsung digunakan mengingat alokasi pos belanja tersebut banyak diserap untuk kegiatan aparatur termasuk gaji pegawai negeri seperti Dokter, Bidan ataupun Guru tingkat SD, SMP maupun SMA yang berperan langsung

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan mempertimbangkan faktor tersebut maka faktor yang mempengaruhi IPM lebih tepat diidentifikasi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut apakah indeks kemahalan konstruksi, pertumbuhan ekonomi dan alokasi belanja modal berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) kabupaten/ kota di Sumatera utara.

2. Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/*Human Development Index* (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, buta huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. HDI digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. HDI mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia yaitu 1) hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran; 2) pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar, menengah, atas *gross enrollment ratio* (bobot satu per tiga) dan 3) standard kehidupan yang layak diukur dengan GDP per kapita *gross domestic product* / produk domestik bruto dalam paritas kekuatan beli *purchasing power parity* dalam Dollar AS.

Indeks Kemahalan Konstruksi

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) menurut Biro Pusat Statistik (2008) adalah angka indeks yang menggambarkan perbandingan TTK suatu kabupaten / kota atau provinsi terhadap TTK rata-rata Nasional. Konsep dan definisi umum yang digunakan dalam proses pengumpulan data dan penghitungan indeks kemahalan konstruksi (IKK) antara lain: konsep mengenai harga barang konstruksi termasuk harga sewa alat berat, pedagang besar, kegiatan konstruksi, tingkat kemahalan konstruksi, diagram timbang, dan indeks kemahalan konstruksi. Semakin tinggi Indeks Kemahalan Konstruksi suatu daerah maka semakin rendah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi terkait dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Proses pembangunan mencakup perubahan pada komposisi produksi, perubahan pada pola penggunaan (alokasi) sumber daya produksi diantara sektor-sektor kegiatan ekonomi, perubahan pada pola distribusi kekayaan dan pendapatan diantara berbagai golongan pelaku ekonomi, perubahan pada kerangka kelembagaan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh (Todaro, 1998).

Produk Domestik Regional Bruto

Tujuan dan kegunaan Produk Domestik Regional Bruto adalah untuk memperoleh gambaran secara umum maupun rinci (sektoral) tentang keadaan perekonomian suatu daerah. Penyajian yang berkesinambungan dari tahun ke tahun akan memberikan gambaran tentang tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat kemakmuran, tingkat inflasi, maupun deflasi gambaran struktur perekonomian suatu daerah.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2008) PDRB dapat diartikan ke dalam tiga pengertian yaitu :

- a. Menurut pengertian produksi, PDRB adalah sejumlah nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di dalam suatu wilayah (*region*) dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).
- b. Menurut pengertian pendapatan, PDRB adalah sejumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Balas jasa faktor produksi meliputi upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak tidak langsung lainnya. Domestik Regional Bruto, kecuali faktor pendapatan diaas, termasuk pula komponen penyusutan barang modal tetap dan pajak tak langsung netto. Semua komponen pendapatan ini secara sektoral disebut Nilai Tambah Bruto, sehingga Produk Domestik region Bruto adalah nilai penjumlahan pada nilai tambah dari seluruh sektor (lapangan usaha).
- c. Menurut pengertian pengeluaran, PDRB adalah jumlah pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi Pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan *stock* dan ekspor *netto* (ekspor dikurangi impor).

Badan Pusat Statistik membagi PDRB menurut sektor/lapangan usaha terdiri dari:

1. Sektor Pertanian;
2. Sektor Pertambangan dan Penggalian;
3. Sektor Industri pengolahan;
4. Sektor Listrik, Gas dan Air Minum;
5. Sektor Bangunan;
6. Sektor Perdagangan;
7. Sektor Transportasi dan Komunikasi;
8. Sektor Keuangan, Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan;
9. Sektor Jasa-Jasa;

Belanja Modal

Menurut Halim (2004: 73), “Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah *assets* atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok Belanja Administrasi Umum”. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 53 ayat 1 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah juga disebutkan bahwa Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Menurut Syaiful (2007: 2-3), Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama :

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan,

pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/penggantian, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan, pembangunan/pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
5. Belanja Modal Fisik Lainnya
Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan termasuk dalam belanja ini adalah belanja kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

Tinjauan Penelitian Terdahulu

Beberapa riset terkait dengan penelitian ini adalah :

Tabel 1
Daftar Tinjauan Peneliti Terdahulu

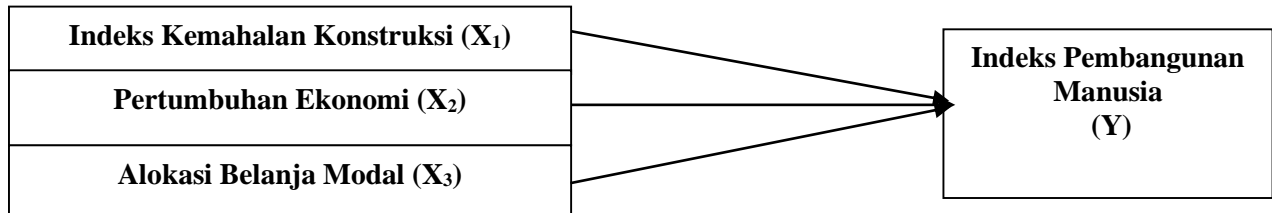
Nama	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Lugastoro, Decta Pitron. 2013.	Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/ Kota di Jawa Timur.	PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/Kota di Jawa Timur.
Kharismawan, Gion (2009)	Analisis Dampak Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia(IPM) di	Belanja Rutin, Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia	Variabel Belanja Rutin tidak berpengaruh signifikan sedangkan variabel Belanja Modal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di propinsi Jawa Timur.

Jawa Timur			
Dina Rosiana Sihombing (2010)	Analisis Pengaruh Determinan Indeks Pembangunan Manusia Dikaitkan Dengan Pembangunan Wilayah Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara	Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara	Secara parsial Pertumbuhan Ekonomi yang diproksikan oleh PDRB harga berlaku yang berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, sedangkan variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya Indeks Pembangunan Manusia
Fhino Andrea (2009)	Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal Dan Kualitas Pembangunan Manusia	DAU, Belanja Modal, Indeks Pembangunan Manusia	DAU berpengaruh positif terhadap belanja Modal, Belanja Modal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia
Budi D. Sinullingga (2009)	Analisis Pengaruh Alokasi Sektor Anggaran Pemerintah Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Kota Medan)	Alokasi Sektor Anggaran Pemerintah, Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia	Sektor-sektor infrastruktur pemukiman memiliki pengaruh langsung relatif kecil terhadap peningkatan IPM, dan diantara sektor infrastruktur ini yang paling kecil pengaruhnya ialah sektor perumahan. Sektor transportasi dan pembangunan daerah juga mempunyai pengaruh terhadap IPM melalui pertumbuhan ekonomi Sektor yang secara langsung menangani komponen peningkatan IPM, yaitu sektor pendidikan dan kesehatan kurang efektif meningkatkan IPM, yang menjadi penyebabnya adalah kecilnya anggaran sehingga kurang efektif mengimbangi kondisi perekonomian yang dilanda krisis.

Kerangka Konseptual

Adapun model yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1 : Kerangka Konseptual



Suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi yang dimaksud dalam survei ini adalah hanya kegiatan pembangunan baru. Hasil kegiatan antara lain: gedung, jalan jembatan, rel dan jembatan kereta api, terowongan, bangunan air dan drainase, bangunan sanitasi, landasan pesawat terbang, dermaga, bangunan pembangkit listrik, transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi. Sedangkan kegiatan konstruksi meliputi perencanaan, persiapan, pembuatan, pembongkaran, dan perbaikan bangunan. Apabila tingkat konstruksi suatu daerah begitu tinggi maka tingkat kesejahteraan manusianya semakin rendah. Begitu juga sebaliknya apabila IKK rendah maka kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dapat meningkat.

Pertumbuhan ekonomi yang diprosikan dengan *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) merupakan refleksi dari pertumbuhan 9 (sembilan) sektor ekonomi yang dihitung berdasarkan pendekatan produksi. Apabila pertumbuhan ekonomi tinggi maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Tingginya pendapatan masyarakat akan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga dapat memenuhi kualitas pembangunan manusia yang memenuhi dimensi yang sangat luas dan banyak pilihan. Tingginya derajat penghasilan penduduk akan memiliki peluang meningkatkan kualitas kehidupan dan angka harapan hidup yang tinggi atau umur panjang dan sehat, memiliki pengetahuan dan keterampilan atau keahlian serta mempunyai peluang atau kesempatan untuk merealisasikan pengetahuan tersebut dalam kegiatan yang produktif sehingga penduduk memiliki daya beli. Dengan kata lain manusia itu harus berkualitas, serta berproduktivitas tinggi. Sehingga dapat mewujudkan kehidupannya yang mencapai standar hidup yang layak.

Apabila kinerja pemerintah daerah membaik maka dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Kinerja pemerintah daerah meningkat ditandai banyaknya total belanja daerah yang dibelanjakan untuk kegiatan pembangunan di suatu daerah maka akan berimbas meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, meningkatnya derajat pendidikan masyarakat dan rendahnya tingkat kematian ibu. Semakin tinggi alokasi belanja modal dianggarkan pada suatu wilayah maka tingkat infrastruktur suatu daerah semakin baik. Fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan memadai sehingga kualitas manusia yang ada pada suatu wilayah sejahtera.

Hipotesis Penelitian

Adapun Hipotesis Penelitian ini adalah: Indeks Kemahalan Konstruksi, Pertumbuhan Ekonomi dan Alokasi Belanja Modal berpengaruh secara simultan dan secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Utara.

3. Metode Penelitian

Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menguji teori-teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintahan Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara berjumlah 33 kabupaten dan kota. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 25 (dua puluh lima) pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara pada tahun 2005-2011 dengan teknik penarikan *sample purposive sampling*.

Variabel Penelitian

a. Indeks Pembangunan Manusia (Y)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang terbentuk dari perkalian angka harapan hidup waktu lahir, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah sebagai ukuran pencapaian pendidikan serta pengeluaran konsumsi yang mencerminkan kemampuan daya beli.

b. Indeks Kemahalan Konstruksi (X_1)

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) adalah angka indeks yang menggambarkan perbandingan TTK suatu kabupaten / kota atau provinsi terhadap TTK rata-rata Nasional..

b. Pertumbuhan Ekonomi (X_2)

Pertumbuhan ekonomi yang diproksikan oleh Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang pada umumnya digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi di suatu negara. Sedangkan untuk tingkat lokal atau *district* disebut dengan *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB). PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu Daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. PDRB yang dihasilkan masing-masing Propinsi berasal dari potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut.

c. Belanja Modal (X_3)

Belanja modal adalah jumlah anggaran pengeluaran baik langsung maupun tidak langsung terkait dan berhubungan dengan program atau kegiatan. Belanja Modal berasal dari alokasi belanja langsung yang dikucurkan pada total belanja. Belanja modal merupakan belanja yang wajib dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah.

Definisi Operasional Variabel

Untuk menjelaskan variabel-variabel yang sudah diidentifikasi, maka operasional variabel terdapat pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Operasionalisasi Variabel

Nama Variabel	Definisi	Indikator	Kriteria Ukuran	Skala
Indeks Pembangunan Manusia (Y)	Indikator komposit tunggal pembangunan manusia, tetapi telah memperhatikan tiga hal yang paling penting yaitu angka harapan hidup waktu lahir, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah sebagai ukuran pencapaian pendidikan serta pengeluaran konsumsi yang mencerminkan kemampuan dayabeli.	suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu usia hidup (<i>longevity</i>), pengetahuan (<i>knowledge</i>), dan standar hidup layak (<i>decent living</i>).	Point IPM (Point)	Rasio
Indeks Kemahalan Konstruksi (X1)	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) adalah angka indeks yang menggambarkan perbandingan TKK suatu kabupaten / kota atau provinsi terhadap TKK rata-rata Nasional.	TKK suatu Kabupaten dan Kota/TKK rata-rata Nasional	Point tingkat Kemahalan Konstruksi	Rasio
Pertumbuhan Ekonomi (X2)	Indikator pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang diukur dari total 9 sektor yang ada yang dengan pendekatan produksi barang dan jasa.	Product Domestic Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku	Jumlah PDRB Harga Berlaku di Sumut tahun 2005-2010 (Milyar)	Rasio
Pertumbuhan Belanja Modal (X3)	Pertumbuhan jumlah anggaran pengeluaran baik langsung maupun tidak langsung terkait dan berhubungan dengan program atau kegiatan.	Realisasi Belanja Modal	Realisasi Belanja Modal	Rasio

Model Analisis

Model yang dibangun merupakan suatu fungsi matematis kedalam analisis regresi berganda dengan metode *Multiple Regression Analysis* dengan pertimbangan bahwa objek data silang lebih besar dari banyaknya koefisien.

$$Y_t = a + b_1X_{t-1} + b_2X_{t-2} + b_3X_{t-3} + \varepsilon$$

dimana:

Y	=	Indeks Pembangunan Manusia
X ₁	=	Indeks Kemahalan Konstruksi
X ₂	=	Pertumbuhan Ekonomi
X ₃	=	Total Belanja Modal
b ₁ ..b ₃	=	Koefesien regresi
ε	=	Error Term

Model tersebut diaplikasikan pada SPSS 20. Pengujian mengenai ada tidaknya pelanggaran terhadap asumsi-asumsi klasik yang merupakan dasar dalam model regresi linier berganda. Hal ini dilakukan sebelum dilakukan pengujian terhadap hipotesis. Asumsi-asumsi klasik tersebut meliputi (Gujarati,2004) data terdistribusi secara normal (Normalitas Data), tidak terdapat *multikolinieritas* diantara atau semua variabel independen. Tidak terdapat *heteroskedastisitas*, yaitu ragam *error* yang tidak konstan pada setiap variabel. Tidak terjadi *autokorelasi*, yaitu korelasi antar *error* atau tidak dipengaruhi oleh unsur gangguan. Setelah melewati Uji Asumsi Klasik maka selanjutnya dilakukan Uji F, Uji t dan penilaian variasi hubungan antar variabel dengan Koefesien Determinasi (R²).

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Deskripsi Data Penelitian

Sebelum melakukan pembahasan mengenai data secara statistik harus terlebih dahulu memperhatikan deskripsi data Kabupaten/Kota yang telah ditentukan sebagai sampel. Kabupaten/Kota yang terpilih menjadi sampel penelitian adalah sebanyak 25 (dua puluh lima) Kabupaten Kota di Sumatera Utara yang terdapat pada Tabel 2 pada bab sebelumnya. Berdasarkan model yang diperoleh diperoleh deskripsi statistik dari 150 (seratus lima puluh) observasi data penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3
Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
IKK_X1	150	81.05	235.01	127.9190	36.99647
PE_X2	150	826.00	83315.00	7403.9467	12908.00718
BM_X3	150	1594055.00	471165832.00	112407362.30	84345554.92467
IPM_Y	150	63.20	77.82	73.0573	2.71502
Valid N (listwise)	150				

Sumber : Lampiran (data diolah SPSS).

Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat bahwa dari jumlah N sampel sebanyak 150, dimana rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM/Y) Kabupaten Kota di Sumut sebesar 77.82 artinya realisasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kota di Sumut yang terdiri dari Indeks komposit terbentuk atas empat komponen indikator, yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan kemampuan daya beli/*purchasing power parity* (PPP) mencapai indeks sebesar 77.82 yang dicapai oleh Pemerintah Kota Pematang Siantar. IPM terendah sebesar 63.20 diperoleh oleh Kabupaten Nias Selatan, IPM rata-rata sebesar 73.05 dengan standar deviasi sebesar 2.71 poin. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) terendah sebesar 81.05 dan tertinggi sebesar 235.01 dengan standar deviasi 36.99 poin dari rata - rata.

Pertumbuhan ekonomi yang diproksikan oleh PDRB Harga Berlaku tertinggi mencapai 83.315 Trilyun dicapai oleh Kota Medan, terendah sebesar 826 Milyar dicapai oleh Humbang Hasundutan dan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 7.4 Trilyun Rupiah dengan standar deviasi dari rata-rata mencapai 12.9 Trilyun Rupiah. Besarnya Pertumbuhan Ekonomi yang diproksikan oleh PDRB harga berlaku pada Kabupaten Kota di Sumatera Utara rata-rata pertumbuhannya sebesar 0.23 % dari rata-rata. Pertumbuhan PDRB tertinggi mencapai 7.8 % dan penurunan PDRB terendah sebesar 1.04 %. Penurunan PDRB disebabkan karena adanya pemekaran dari Kabupaten induk. Dengan demikian terjadi pertumbuhan yang dinamis pada Kabupaten Kota di Sumatera Utara. Besarnya Standar deviasi dari rata-rata PDRB sebesar tersebut menggambarkan tingginya disparitas pertumbuhan ekonomi antar daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara sebesar 0.74 % artinya dispartitas perbedaan tidak terlalu besar dari rata-rata pertumbuhan yang sebesar 0.23 %. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi tersebut dapat terus dipertahankan dan diupayakan terus meningkat dan dapat melampaui pertumbuhan ekonomi nasional.

Rata-rata peningkatan Belanja Modal (BM) Kabupaten Kota di Sumut sebanyak 112,41 Milyar Rupiah. Rata-rata Belanja Modal tersebut mengindikasikan bahwa kebutuhan untuk mengalokasikan atas belanja pembangunan cenderung meningkat. Alokasi Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang langsung berhubungan ke masyarakat seperti Pembangunan Jalan dan Jembatan dan juga Irigasi. Semakin tinggi belanja modal suatu daerah menunjukkan tingginya perhatian pemerintah daerah untuk memenuhi sarana dan prasarana kepada masyarakat. Jumlah Belanja Modal (BM) tertinggi sebesar 471.16 Milyar Rupiah. Hal ini disebabkan karena kebutuhan untuk menutupi Belanja Tidak Langsung yang begitu besar sehingga proporsi belanja modal harus besar. Alokasi Belanja Modal tertinggi dialokasikan oleh Kota Medan. Tingginya alokasi belanja modal tersebut disebabkan tingginya PAD ataupun tingginya penerimaan sehingga alokasi belanja modal lebih banyak dianggarkan. Beberapa daerah yang memiliki Belanja Modal yang tinggi seperti Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan dan Nias Selatan. Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok Belanja Administrasi Umum.

Belanja Modal merupakan belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas di berbagai sektor, produktifitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Indeks Kemahalan Konstruksi di Pulau Nias berbeda dengan Indeks Kemahalan Konstruksi pada Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Utara. Selain itu tingkat

pertumbuhan ekonomi diatas rata-rata hanya pada Kota Medan, Langkat, Asahan, Labuhan Batu, Simalungun dan Serdang Bedagai sedangkan pada wilayah lainnya di Sumatera Utara masih dibawah rata-rata. Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara masih rendah yaitu sekitar 15 % dari APBD. Tingkat ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kabupaten Kota di Sumatera Utara relatif kecil.

Hasil Analisis

Setelah melewati uji asumsi klasik maka selanjutnya dilakukan uji hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini adalah Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Sumatera Utara secara simultan dapat diterima. Sedangkan secara parsial hanya Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan Pertumbuhan Ekonomi yang berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Sedangkan variabel Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Karena variabel penelitian lebih dari dua variabel maka kelayakan tersebut dapat dilihat dari nilai *Adjusted R Square*. Nilai *Adjusted R Square* yang diperoleh dari hasil pengolahan data dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4
Pengujian Kelayakan Model
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.382 ^a	.146	.128	2.53527	1.263

a. Predictors: (Constant), BM_X3, IKK_X1, PE_X2

b. Dependent Variable: IPM_Y

Sumber : Hasil Olah Data SPSS. (Lampiran).

Nilai *Adjusted R Square* pada Tabel 4 diatas sebesar 0,128. Hal ini menunjukkan bahwa hanya 12.8 % variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dijelaskan oleh variabel independen yang ada yaitu Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal. Sisanya sebesar 87.2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan oleh model penelitian ini. Untuk melihat tingkat kepercayaan hasil uji hipotesis, selanjutnya dilakukan uji signifikan. Uji signifikan dibedakan atas uji signifikan simultan (uji F) dan uji signifikan parsial (uji t) dengan taraf signifikan $\alpha = 5\%$.

Model Uji Hipotesis

Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Secara simultan variabel Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Sumatera Utara secara simultan dapat diterima. Indikator signifikansi parameter koefisien *Adjusted R²* signifikan atau tidak maka dapat dilakukan pengujian dengan bantuan alat uji statistik metode Fisher (Uji F) dengan tingkat keyakinan (*confident level*) sebesar 95 %. Kriteria pengujian yang digunakan adalah apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0

ditolak; dan apabila $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ maka H_0 dapat diterima. Hal tersebut ditunjukkan dalam Tabel 5.

Tabel 5
Hasil Regresi Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	159.900	3	53.300	8.292	.000 ^b
	Residual	938.426	146	6.428		
	Total	1098.326	149			

a. Dependent Variable: IPM_Y

b. Predictors: (Constant), BM_X3, IKK_X1, PE_X2

Sumber : Hasil Olah Data SPSS. (Lampiran).

Dari Tabel 5 diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 8,292 sedangkan F_{tabel} pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$) adalah 2,52. Hal ini berarti bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ (8,292 > 2,52). Hal ini memberikan arti bahwa Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Dengan demikian hipotesis bahwa Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara diterima (H_0 ditolak sedangkan H_1 diterima).

Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Secara parsial variabel Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat diterima ditunjukkan pada Tabel 6.

Tabel 6
Uji t

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	74.620	.769		.000
	IKK_X1	-.016	.006	-.217	.008
	PE_X2	6.225E-005	.000	.296	.004
	BM_X3	9.549E-011	.000	.003	.977

Sumber : Hasil Olah Data SPSS. (Lampiran).

Dari Tabel 4.4 diatas dapat disusun persamaan regresi berganda berikut :

$$PE_Y = 74.620 - 0,016X_1 + 0,00006225X_2 + 0,0000009549X_3 + e$$

Model persamaan regresi berganda tersebut bermakna:

1. Nilai konstanta sebesar 74.620 artinya apabila nilai variabel Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal bernilai nol, maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 74.62 satuan.
2. Variabel Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan nilai koefisien sebesar 0.016, artinya setiap pertambahan 1 % variabel Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) maka akan menurunkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0.016 satuan.
3. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan nilai koefisien sebesar 0,00006225, artinya setiap pertambahan 1 % variabel pertumbuhan ekonomi akan menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0.0000225 satuan.
4. Variabel Pertumbuhan belanja modal/pembangunan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan nilai koefisien sebesar 0,0000009549, artinya setiap pertambahan 1 % variabel pertumbuhan belanja modal akan menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,0000009549 satuan.

Tabel 6 menunjukkan bahwa variabel Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)/ X_1 ($-2,698 > 1,980$) bermakna variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Utara dimana nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$. Begitu juga variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE)/ X_2 ($2,896 > 1,980$) bermakna variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Utara dimana nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$. Dengan demikian menolak H_0 dan menerima H_1 . Variabel Pertumbuhan Belanja Modal/ X_3 ($0,029 < 1,980$) tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Utara dimana nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$. Dengan demikian menerima H_0 dan menolak H_1 . Sedangkan variabel Pertumbuhan Ekonomi (X_3) dengan arah positif ($1,929 < 1,980$) tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Utara dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan demikian menerima H_0 dan menolak H_1 .

Secara simultan variabel Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Sumatera Utara secara simultan dapat diterima. Sedangkan secara parsial variabel Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

Variabel Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara disebabkan adanya sebuah fenomena dimana Indeks kemahalan konstruksi (IKK) merupakan angka indeks yang menunjukkan perbandingan harga bahan bangunan/konstruksi antar lokasi yang berbeda pada periode yang sama. Dengan demikian, penghitungan IKK harus dilakukan secara *comparable* dan *representative*. IKK dihitung menurut jenis kelompok barang/komoditas yang terdiri dari 3 (tiga) jenis kelompok bangunan. IKK umum yang merupakan angka tertimbang dari ketiga kelompok jenis bangunan tersebut.

Dalam melakukan penghitungan IKK dibutuhkan data/komponen penunjang, seperti paket komoditas, diagram timbang, dan data harga-harga jenis bahan bangunan yang menjadi paket komoditas penghitungan IKK. Pengertian paket komoditas IKK dalam hal ini adalah suatu keranjang atau paket yang terdiri dari sejumlah bahan bangunan/konstruksi yang dominan digunakan untuk membangun satu unit bangunan/konstruksi. Untuk penghitungan IKK tahun 2011, diasumsikan jumlah bahan bangunan dan sewa alat-alat berat yang menjadi

paket komoditas berjumlah 22, terdiri dari 18 jenis bahan bangunan dan 4 sewa alat berat (BPS, 2008).

Paket komoditas yang digunakan dalam penghitungan IKK 2011 terdiri dari 18 jenis barang dan 4 sewa alat berat yang dipilih dari 60 jenis barang dan 4 sewa alat berat yang terdapat dalam daftar HPB-K. Adapun jenis barang dan sewa alat berat tersebut yaitu: pasir, batu pondasi, batu bata, batu split, semen abu-abu, pipa PVC, seng plat, seng gelombang, paku, besi beton, keramik polos, kayu papan, kayu balok, kayu lapis, cat tembok putih, cat kayu/besi, kaca polos bening, aspal, *excavator*, *bulldozer*, *three wheel roller* (mesin gilasp), dan *dump truck*. Ke-18 jenis barang dan 4 sewa alat berat tersebut dipilih karena mempunyai nilai atau andil cukup besar dan data harga barang-barang tersebut *comparable* atau mempunyai keterbandingan antar kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Penghitungan IKK kabupaten/kota tahun 2011 ini menggunakan dua jenis penimbang, yakni diagram timbang kelompok jenis bangunan dan diagram timbang IKK umum. Diagram timbang kelompok jenis bangunan disusun berdasarkan kuantitas/volume bahan bangunan/sewa alat berat/jasa yang dibutuhkan untuk membangun 1 unit bangunan per satuan ukuran luas untuk masing-masing kelompok jenis bangunan. Pengelompokan jenis bangunan yang dimaksud mengacu pada Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) yang terdiri dari 3 (tiga) kelompok jenis bangunan, yaitu:

- a. Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal;
- b. Jalan, jembatan, dan pelabuhan;
- c. Bangunan lainnya.

Perubahan pengelompokan jenis bangunan ini dilakukan agar IKK antar kabupaten/kota yang dihasilkan lebih mempunyai keterbandingan/*comparable*. Kelompok jenis bangunan dan instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi tidak diikutsertakan, dikarenakan kualitas barang-barang dalam kelompok jenis bangunan tersebut sangat beragam antar kabupaten/kota. Sedangkan kelompok jenis bangunan sarana pertanian, tidak relevan lagi digunakan untuk daerah perkotaan. Kuantitas/volume bahan bangunan/sewa alat berat/jasa masing-masing kelompok jenis bangunan dapat berbeda antar kabupaten/kota. Data kuantitas/volume bahan bangunan tersebut diperoleh dari hasil studi pilot tingkat kemahalan harga bahan bangunan/konstruksi.

Diagram timbang umum IKK kabupaten/kota adalah bobot atau andil masing-masing kelompok jenis bangunan untuk menghitung IKK umum kabupaten/kota. Diagram timbang umum IKK ini disusun berdasarkan data realisasi APBD dan pengeluaran belanja pembangunan dan rutin. Data ini diperoleh dari pemerintah kabupaten/kota atau provinsi. Untuk keperluan penghitungan IKK umum kabupaten/kota atau provinsi tahun 2011 digunakan data Realisasi APBD tahun 2010. Cara penyusunan diagram timbang umum IKK sama dengan cara penyusunan diagram timbang IHPB bahan bangunan/konstruksi umum yang intinya adalah memilih pengeluaran untuk pembangunan fisik dan dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kelompok jenis bangunan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit tunggal yang walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, tetapi mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mampu mencerminkan status kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah umur panjang dan sehat, berpengetahuan dan berketerampilan, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak. Konsep Pembangunan Manusia berbeda dengan pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan

ekonomi, dengan diasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan menguntungkan manusia. Pembangunan manusia memperkenalkan konsep yang lebih luas dan komprehensif karena mencakup semua pilihan yang dimiliki oleh manusia diseluruh golongan masyarakat pada tahapan pembangunan. Pembangunan Manusia merupakan perwujudan tujuan jangka panjang dari suatu masyarakat dan meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, bukan manusia disekeliling pembangunan.

Variabel Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disebabkan masalah alokasi Belanja Modal yang tidak signifikan berperan membiayai pembangunan. Rata-Rata alokasi belanja Modal di Sumatera Utara hanya sebesar 15 %. Selain itu perkembangan belanja modal mengalami penurunan dalam pengalokasiannya disebabkan semakin banyaknya jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah dimana APBD yang dialokasikan banyak untuk keperluan Belanja Tidak Langsung.

Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja modal hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan. Dampak penggunaan belanja modal akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan akan berdampak meningkatnya perekonomian masyarakat. Penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program pelayanan publik, hal ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja pemerintah daerah untuk berbagai kepentingan publik. Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, menunjukkan bahwa potensi fiskal pemerintah daerah antara satu dengan daerah yang lain bisa jadi sangat beragam. Perbedaan ini pada gilirannya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang beragam pula. Pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik.

Hasil penelitian ini mendukung hasil yang dicapai oleh Sihombing (2009) dimana variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Akan tetapi hasil penelitian ini kontradiksi dengan hasil yang dicapai oleh Kharismawan (2009) dimana variabel Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

5. Kesimpulan, Implikasi dan Keterbatasan Penelitian

Kesimpulan

1. Secara simultan variabel Indeks Kemahalan Konstruksi, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian Sihombing (2009) dan Kharismawan (2009).
2. Secara parsial variabel Indeks Kemahalan Konstruksi dan Pertumbuhan Ekonomi yang berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Sedangkan variabel Belanja Modal/Pembangunan tidak berpengaruh signifikan dengan tingkat alpha 5 % terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini yaitu :

1. Sampel dalam penelitian ini dibatasi pada kabupaten/kota tertentu yang memiliki ketersediaan data, yaitu 25 kabupaten/ kota di Propinsi Sumatera Utara. Hal ini

menyebabkan hasil penelitian hanya berlaku untuk kabupaten/ kota yang menjadi sampel penelitian, sehingga belum dapat di generalisasi untuk seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.

2. Pada kajian ini hanya menggunakan variabel Indeks Kemahalan Konstruksi, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal. Ada indikator lain yang perlu dipertimbangkan yang dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Tingkat inflasi dan variabel lainnya yang tidak dipertimbangkan pada penelitian ini.
3. Kajian ini tidak melakukan pemisahan indikator Indeks Kemahalan Konstruksi berdasarkan kelompok Bangunan dan Non Bangunan.
4. Terjadinya perbedaan tingkat Pertumbuhan Ekonomi disebabkan karena adanya perbedaan ukuran wilayah yaitu adanya wilayah perkotaan dan kabupaten. Semakin luas wilayah maka semakin tinggi pergerakan geliat ekonomi.
5. Penelitian ini tidak memberikan secara rinci alokasi penggunaan Komponen Belanja Modal/Pembangunan berdasarkan konstruk pembentuknya seperti alokasi dalam rangka menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat atau meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.
6. Tingkat ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang digunakan adalah IPM total sementara IPM bisa dipisahkan lagi berdasarkan pada indikator angka harapan hidup, angka melek huruf dan tingkat daya beli.

Implikasi

1. Bagi Bapak Gubernur Sumatera Utara agar membenahi sarana infrastruktur terutama Pantai Barat mengingat Indeks Kemahalan Konstruksi yang berbeda antara Pantai Barat dengan Pantai Timur.
2. Bagi Anggota Dewan DPRD Provinsi Sumatera Utara melakukan pengawasan dan perhatian khusus atas alokasi anggaran Belanja Modal karena alokasi Belanja Modal tidak besar perannya terhadap perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Utara .
3. Bagi peneliti berikutnya dimasa mendatang agar memperluas sampel penelitian pada skop Indonesia sehingga bisa diidentifikasi permasalahan utama pada lingkup yang lebih luas.
4. Peneliti berikutnya agar mempertimbangkan aspek wilayah yaitu adanya wilayah perkotaan dan kabupaten. Dengan meneliti aspek perbedaan wilayah Kabupaten dengan Kota maka akan dapat menekan pengaruh perbedaan efek luas wilayah.
5. Dimasa yang akan datang pihak eksekutif maupun legislatif agar memperbesar porsi Belanja Modal karena saat ini alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota jumlahnya minim disebabkan besarnya kebutuhan belanja lainnya terutama Belanja Tidak Langsung seperti Gaji Pegawai Negeri Sipil.
6. Dimasa yang akan datang agar lebih meningkatkan alokasi anggaran yang terkait dengan program peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sehingga Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Utara lebih meningkat.

Daftar Pustaka

- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Brata, Aloysius Gunadi, 2004. *Analisis Hubungan Imbal Balik Antara Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Daerah Tingkat II di Indonesia*. Lembaga Penelitian – Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
- Brata, Aloysius Gunadi, 2005. *Investasi Sektor Publik Lokal, Pembangunan Manusia, dan Kemiskinan*. Lembaga Penelitian – Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.

- Budi D. Sinullingga (2009). Analisis Pengaruh Alokasi Sektor Anggaran Pemerintah Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Kota Medan). *Disertasi PW USU Medan*.
- Darwanto dan Yustikasari, Yulia, 2007, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, Vol 08 No 01. February 2007, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta.
- Kharismawan, Gion Muhammad. 2009. Analisis Dampak Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur. *Journal Online* Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Lugastoro, Decta Pitron. 2013. Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Online* Universitas Brawijaya Malang.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Nana, Nketcha. 2008. Expenditure Decentralization and Outcomes: Some Determinant Factor for Success from Cross Country Evidence. *Journal*. Proceeding of The African Economic Conference.
- Nerayan, Paresh Kumar. 2005. The Government Revenue and Government Expenditure Nexus: Empirical Evidence from Nine Asian Countries. *Journal Of Asian Economics*. Department of Accounting, Finance and Economics, Griffith University. Australia.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Ranis, Gustav and Stewart, Frances. 2002. *Economic Growth and Human Development in Latin America*. Cepal No. 78. The UN Economic Commission for Latin America and the Caribbean. <http://www.eclac.org/publicaciones/xml/2/19952/lcg2187i-Ranis.pdf>. Diakses pada tanggal 07 Mei 2011.
- Sihombing, Dina Rosiana. 2010. *Analisis Pengaruh Determinan Indeks Pembangunan Manusia Dikaitkan Dengan Pembangunan Wilayah Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara*. Tesis PWD USU Medan.
- Sofian Hadi 2008. *Pengaruh PAD, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten / Kota Propinsi Jawa Timur Tahun 2000 – 2004*.
- Syahril. 2011. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara*. Tesis USU Medan.
- Syaiful, 2006. *Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan*. Diklat Depdagri. Jakarta.
- Buku APBD Sumatera Utara Tahun 2005-2010.
- www.bps.go.id. Biro Pusat Statistik Pusat.